SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 105

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001



PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 12 meliputi 3 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing - masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Soreang, Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

MOCHAMAD USMAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197110091991011001

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		**i**
Daftar Isi		**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu ..	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP	21
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP	26
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Satpol PP	36
	3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....**	58
BAB V	**PENUTUP .....**	67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu parallel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025. Rencana Kerja PD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung tahun 2021–2026 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera)

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah, baik

urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan Misi Keempat: "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Bermasyarakat yang berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan" sebagai berikut.

TABEL 1.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP
TAHUN 2021-2026

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera)	M4	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Bermasyarakat yang berlandaskan Nilai-nilai	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Pelaksanaan Layanan terhadap Warga Negara terdampak penegakan perda dan perkada

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
8. Permen dagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 122 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
24. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024
25. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025
26. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor 000.8/011/3683/BAPPERIDA Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025.
27. Surat Pemberitahuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 000.7.2/130/07533/PPED tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyusunan Rancangan Renja/RKPD Tahun 2025 dan Penginputan Rancangan Renja/RKPD Tahun 2025 ke Aplikasi SIPD-RI

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antar wilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan

peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2023

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI	PRESENTASE
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP PD**	**78 point 100 persen**		
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	100
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	100

1	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Asset	1 dokumen	1 dokumen	100
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Rata-rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai >=80%**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	695 stel	695 stel	100
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen P2KP ASN dan Non ASN PD	1 dokumen	1 dokumen	100
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	1 kali	1 kali	100
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan Operasional Perkantoran**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	4 jenis	4 jenis	100
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	10 jenis	10 jenis	100
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	100
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit	-	-
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli	5 unit	-	-
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	1 tahun	1 tahun	100
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 tahun	1 tahun	100
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	100

1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disew a atau diadakan	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10 bulan	10 bulan	100
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Asset yang Baik**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang beroperasi	12 bulan	12 bulan	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak beroperasi	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat bengkel yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	100
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	100
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**100 persen**	
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bandung	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelatihan, sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	12 bulan	12 bulan	100

1	5	2	2.01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang harus Diselesaikan secara Tepat Waktu	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	12 bulan	12 bulan	100
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 persen**	**100 persen**	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12 bulan	12 bulan	100

Walaupun secara umum capaian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Keterbatasan sumber daya anggota yang kompeten dari sisi jumlah maupun kualitas. Pola pikir aparat yang kurang kreatif dan inovatif sehingga tugas yang dijalankan selalu berdasarkan perintah namun bukan karena inisiatif dan kebutuhan. Penggunaan paradigma lama yang melekat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban yang selalu dipadupadankan sehingga akan selalu menggunakan pendekatan lama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dalam konteks ini lebih mengutamakan penyelenggaraan ketertiban sehingga akan sulit mendukung pencapaian ke-4 yang berkaitan dengan tata kehidupan

bermasyarakat (manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif).

- Masih Kurang Optimalnya Sarana Prasarana untuk Penegakan Perda dan Perkada
- Dukungan politis terhadap Satpol PP yang masih meletakan cara pandang organisasi ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik belaka.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026

Kabupaten Bandung

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja Renstra Satpol PP s/d Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Satpol PP Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP PD**	**78,50 point 100 persen**		**78 point 100 persen**		**80.00**	**79,50 point 100 persen**	**79,50 point 100 persen**	
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Kesesuaian Indikator Kinerja dalam Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan tepat waktu	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja PD yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**

1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan		12 bulan	12 bulan	100	64 orang/ bulan	64 orang/ bulan	**100 persen**
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan yang diselesaikan secara tepat w aktu	18 Laporan		3 dokumen	3 dokumen	100	18 Laporan	18 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dalam Database**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Asset	1 Laporan		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Rata-rata Capaian SKP ASN PD yang Memiliki Nilai >=80%**	**100%**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**	**100%**	**100 persen**
1	5	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegaw ai yang terpenuhi	2 Unit		12 bulan	12 bulan	100	2 Unit	2 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	1 Paket		695 stel	695 stel	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	Jumlah dokumen P2KP ASN dan Non ASN PD	1Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegaw ai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	64 orang		1 kali	1 kali	100	64 orang	64 orang	**100 persen**
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan Operasional Perkantoran**	**100%**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**	**100%**	**100 persen**
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	1 Paket		12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	1 Paket		12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang dibeli	1 Paket		12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang dibeli	1 Paket		12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	1 Paket		12 bulan	12 bulan	100	1 Paket	1 Paket	**100 persen**

1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan berlangganan	Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	2 dokumen	2 dokumen	**100 persen**
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah peserta kunjungan tamu	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dan yang diselenggarakan	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	5	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit		-	-	-	2 unit	2 unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli	5 unit		-	-	-	5 unit	5 unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dibeli	2 Unit		-	-	-	2 Unit	2 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 Unit		-	-	-	1 Unit	1 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit		-	-	-	1 Unit	1 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Unit		-	-	-	5 Unit	5 Unit	**100 persen**
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disew a atau diadakan	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Asset yang Baik**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang beroperasi	21 Unit		12 bulan	12 bulan	100	21 Unit	21 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak beroperasi	35 Unit		12 bulan	12 bulan	100	35 Unit	35 Unit	**100 persen**

1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebeul	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit		-	-	-	2 Unit	2 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat bengkel yang terpelihara	20 Unit		-	-	-	20 Unit	20 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit		1 tahun	1 tahun	100	1 Unit	1 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 Unit		1 tahun	1 tahun	100	1 Unit	1 Unit	**100 persen**
1	5	1	2.09	11	Peliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 tahun	1 tahun	100	5 Unit	5 Unit	**100 persen**
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	20 Kasus		12 bulan	12 bulan	100	20 Kasus	20 Kasus	**100 persen**
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	20 Kasus		12 bulan	12 bulan	100	20 Kasus	20 Kasus	**100 persen**
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Bandung	1 Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**

1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelatihan, sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	457 Orang		12 bulan	12 bulan	100	457 Orang	457 Orang	**100 persen**
1	5	2	2.01	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 Unit		12 bulan	12 bulan	100	115 Unit	115 Unit	**100 persen**
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang harus Diselesaikan secara Tepat Waktu	1 Dokumen		12 bulan	12 bulan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	**100 persen**
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	5	2	2.02		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 Persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan		12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	**100 persen**

2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025 (Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021) Sedangkan Rencana Kerja untuk tahun 2025 terurai menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa untuk Program Kegiatan yang terbagi ke dalam 2 Program, 11 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2024.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera)" dan misi nomor empat yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi Yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai – nilai Keagamaan", pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung mendukung misi keempat Kabupaten Bandung. Untuk mencapai misi keempat tersebut, sesuai dengan Tugas yaitu :

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman; dan
3. Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

Fungsi, yaitu :

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelengaraan ketertiban umumdan ketenraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan yaitu :
7. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga negara masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
8. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

9. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaraan atas Perda dan / atau Perkada; dan
10. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

a. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
b. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggaraan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
c. Masih kurangnya jumlah anggota Linmas, berdasarkan Permendgari Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelengggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat pada Pasal 10 Ayat 4 untuk Satgas Linmas yang berada di Kecamatan minimal berjumlah 10 orang, berarti Kabupaten Bandung membutuhkan minimal 31 Kecamatan x 10 orang = 310 orang. Sedangkan untuk Desa/Kelurahan sesuai Pasal 13 dan 19, minimal mempunyai Linmas sebanyak 5 regu dan dalam 1 regu terdiri dari minimal 5 anggota dan 1 orang komandan regu, berarti Kabupaten Bandung membutuhkan minimal anggota Linmas sebanyak 280 Desa/Kelurahan x 6 orang x 5 regu = 8.400 orang. Jadi total minimal kebutuhan Linmas Kabupaten Bandung sesuai Permendagri tersebut adalah 8.400 orang + 310 orang = 8.710 orang.
d. Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dimana hal – hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
b. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Anggota Satpol PP.
c. Peningkatan kemampuan teknis Anggota satpol PP dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
d. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
e. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non pemerintah.
d. Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan Good Governance dilaksanakan dengan arah kebijakan:
e. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

f. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Pelindungan masyarakat.
g. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Bandung dengan arah kebijakan:
h. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
i. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Satpol PP Kabupaten Bandung, Merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsure Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Sub Tugas yaitu :

- Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Satuan yang meliputi Kesekretariatan , Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen Perencanaan Satuan.
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), PEnyusunan indicator kinerja utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kinerja, Proses Bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar pelayanan (SP) Satuan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa kerja Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya.
- Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelnggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umu.
- Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan system informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Satuan.
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing.
- Memantau pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas

- Mengarahkan dan menegndalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Satuan
- Membina bawahan sesuai dengan ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan
- Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk ditanda tangani
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut
- Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan secara Lisan, tertulis , berkala atau sesuai kebutuhan kepada pemimpin
- Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tahun 2025, ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan salah satunya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adanya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga adanya perubahan tata cara pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya pada Satpol PP dari segi pendataan terhadap warga negara yang bakal terdampak dari penegakan Perda dan Perkada.

Terdapat 4 mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya meliputi:

1. Standar operasional prosedur Satpol PP;
2. Standar sarana prasarana Satpol PP;
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Keempat mutu pelayanan dasar tersebut akan dilaksanakan oleh Satpol PP pada kegiatan dan sub kegiatan berikut ini:

Tabel 2.4
Rincian Mutu Pelayanan Dasar dalam Kegiatan/Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

NO	MUTU PELAYANAN DASAR	KODE REKENING/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	50.000.000
		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	245.712.600
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	250.000.000
3	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	600.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	350.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	75.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	75.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	350.000.000
4	Standar Pelayanan yang terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	125.000.000
Jumlah			**2.170.712.600**

Berdasarkan mutu pelayanan dasar SPM pada Satpol PP di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP memiliki 82 SOP yang terdiri dari 15 SOP Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Trantibum dan 67 SOP Sekretariat.

Pada Sarana Prasarana Satpol PP kekurangan kendaraan operasional untuk melaksanakan patroli wilayah dalam penegakan Perda dan Perkada.

Dari segi peningkatan Anggota Satpol PP memiliki anggaran rutin bagi pengembangan kapasitas.

Adapun layanan terhadap warga yang terkena dampak gangguan Trantibum dari penegakan Perda dan Perkada, pada tahun 2025 Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak terjadinya kecelakaan orang maupun kerusakan barang sehingga target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 0 (nol) ganti rugi tercapai.

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, dengan sasaran target sesuai Renstra Satpol PP dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Layanan terhadap warga negara yang terdampak perda dan perkada	SPM	-	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana dan terakhir di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tugas, Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta Dengan Pembentukan Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu menjadi 4 bidang 3 seksi masing-masing bidangnya :
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh, yaitu:

1. Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
4. Bidang Perlindungan Masyarakat;

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung beserta Satlinmas bertugas untuk melaksanakan pengamanan dilaksanakan guna menciptakan rasa tentram, tertib dan merasa terlindunginya masyarakat dalam beraktifitas. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
- Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah; Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli

sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.

- Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum,
- Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung. Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi keempat. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya *responsive* (tanggap darurat) menjadi *preventif* (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung
- Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, melalui pelatihan dan bimtek.
- Tambahan Tenaga Pendukung Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung segera dapat direalisasikan. Apalagi telah terbentuknya unit pelaksanaan Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung.
- Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang bersinggungan dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung.

- Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan, secara cepat, tepat, tegas dan ikhlas. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Satpol PP.
- Masih terdapat program yang dilaksanakan oleh bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Merupakan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka penjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakZat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Bandung

KODE					Pagu Rancangan Awal Tahun 2025				Hasil Analisis Kebutuhan					
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	**5**	**0**	**0**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**57.822.074.531,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**67.823.067.884,00**	
1	**5**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**79 point 100 persen**	**25.519.338.531,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bandung	**Nilai AKIP**	**79 point 100 persen**	**27.919.471.531,00**	
1	**5**	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**100 persen**	**260.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**100 persen**	**260.000.000,00**	
1	5	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100.000.000,00	
1	5	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	
1	5	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	
1	5	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	
1	5	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	
1	5	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	
1	5	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	
1	5	1	2,02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	10.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	10.000.000,00	
1	5	1	2,02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 Data	10.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25 Data	10.000.000,00	

1	**5**	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**100 Persen**	**11.861.035.931,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**100 Persen**	**11.861.035.931,00**	
1	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	11.761.035.931,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	11.761.035.931,00	
1	5	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000,00	
1	5	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	30.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	30.000.000,00	
1	5	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	35.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	35.000.000,00	
1	**5**	**1**	**2,03**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	
1	5	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	
1	5	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	
1	**5**	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**	**100%**	**240.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**	**100%**	**240.000.000,00**	
1	5	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	2 Unit	15.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	2 Unit	15.000.000,00	
1	5	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00	
1	5	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegaw ai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	1Dokumen	25.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegaw ai	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	1Dokumen	25.000.000,00	
1	5	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	100.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64 orang	100.000.000,00	
1	**5**	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**	**100%**	**808.573.789,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**	**100%**	**808.573.789,00**	
1	5	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	
1	5	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	
1	5	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	
1	5	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	
1	5	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	
1	5	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	51.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	51.000.000,00	
1	5	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	
1	5	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	437.573.789,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	437.573.789,00	

1	**5**	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**215.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**215.000.000,00**	
1	5	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	50.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	50.000.000,00	
1	5	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	50.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	50.000.000,00	
1	5	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	
1	5	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	
1	5	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	50.000.000,00	
1	5	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	
1	5	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	
1	**5**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**11.599.728.811,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**100 Persen**	**13.813.488.811,00**	
1	5	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000,00	
1	5	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	
1	5	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.474.728.811,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.688.488.811,00	
1	**5**	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan aset yang baik**	**100 Persen**	**505.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bandung	**Persentase ketersediaan aset yang baik**	**100 Persen**	**691.373.000,00**	
1	5	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	98.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	98.000.000,00	
1	5	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	312.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	498.373.000,00	
1	5	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	
1	5	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00	
1	5	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	
1	5	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	
1	5	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	
					Jumlah 1			**25.519.338.531,00**	**Jumlah 1**				**27.919.471.531,00**	

1	**5**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**		**32.302.736.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kab. Bandung	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**		**39.903.596.353**	
1	**5**	**02**	**2,01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**100 persen**	**30.407.736.000**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bandung	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**100 persen**	**38.008.596.353**	
1	5	2	2,01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	150.000.000	
1	5	2	2,01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	19.987.023.400	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	22.987.023.400	
1	5	2	2,01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	600.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	457 orang	600.000.000	
1	5	2	2,01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	3.500.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	7.287.213.353	
1	5	2	2,01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	75.000.000	
1	5	2	2,01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	orang	350.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kab. Bandung	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	orang	350.000.000	

1	5	2	2,01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	dokumen	50.000.000	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Kab. Bandung	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	dokumen	50.000.000	
1	5	2	2,01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	orang	75.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Kab. Bandung	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	orang	75.000.000	
1	5	2	2,01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	orang	750.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Kab. Bandung	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	orang	750.000.000	
1	5	2	2,01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	orang	350.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	orang	350.000.000	
1	5	2	2,01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	800 laporan	4.000.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	800 laporan	4.813.647.000	
1	5	2	2,01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	800 laporan	150.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	800 laporan	150.000.000	
1	5	2	2,01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada w arga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	125.000.000	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada w arga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	125.000.000	
1	5	2	2,01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	245.712.600	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	115 unit	245.712.600	
1	**5**	**2**	**2,02**	**0**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 persen**	**1.475.000.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Kab. Bandung	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	**100 persen**	**1.475.000.000**	
1	5	2	2,02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	150.000.000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	150.000.000	
1	5	2	2,02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dokumen	50.000.000	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dokumen	50.000.000	

1	5	2	2,02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	250.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	250.000.000	
1	5	2	2,02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	100.000.000	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	100.000.000	
1	5	2	2,02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan	75.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan	75.000.000	
1	5	2	2,02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	dokumen	50.000.000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	dokumen	50.000.000	
1	5	2	2,02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	200.000.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	200.000.000,00	
1	5	2	2,02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	300.000.000,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 laporan	300.000.000,00	
1	5	2	2,02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	300.000.000,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	300.000.000,00	
1	**5**	**2**	**2,03**	**0**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 persen**	**420.000.000**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Kab. Bandung	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 persen**	**420.000.000**	
1	5	2	2,03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	dokumen	100.000.000	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Bandung	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	dokumen	100.000.000	
1	5	2	2,03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	dokumen	100.000.000	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	dokumen	100.000.000	
1	5	2	2,03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	laporan	100.000.000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	laporan	100.000.000	
1	5	2	2,03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	laporan	50.000.000	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	laporan	50.000.000	
1	5	2	2,03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	70.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	70.000.000	
					Jumlah 2			**32.302.736.000**	**Jumlah 2**				**39.903.596.353**	
					TOTAL (jumlah 1 + 2)			**57.822.074.531,00**	**TOTAL (jumlah 1 + 2)**				**67.823.067.884,00**	

Pada Tabel T.C-31 diatas, terdapat beberapa penjelasan yaitu :

- Pada Rancangan awal RKPD Tahun 2025 Satpol PP mempunyai Pagu Anggaran sebesar **Rp. 57.822.074.531,-** (*Lima puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*)
- Sedangkan pada Pagu KUAPPAS atau Pagu RKPD 2025, Satpol PP mendapat penambahan pagu sebesar **Rp. 10.000.993.353,-** (*Sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*) sehingga Pagu Anggaran Satpol PP pada renja 2025 adalah sebesar **Rp. 67.823.067.884,-** (*Enam puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat 14 prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu "Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung masuk dalam misi ke-empat yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan nilai-nilai Keagamaan". Untuk mendukung pencapaian misi ke-empat Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu:

1. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Pelindungan Masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja` Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026.

TABEL 3.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP
TAHUN 2021-2026

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif,	M4	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional dan Tata Kehidupan	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak	Pelaksanaan Layanan terhadap Warga Negara terdampak

Untuk itu diperlukan tindakan nyata dalam bentuk progress kedepan agar sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
- Memberdayakan Satpol PP dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas.
- Menjalin kerjasama dengan aparat lainnya, serta berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan Polres, Kodim, Polsek dan Koramil di wilayah Kabupaten Bandung dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Meningkatkan koordinasidengan SKPD lainnya dalam hal penegakan disiplin aparatur.

Adapun hal-hal yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Meningkatnya Aparatur Satpol PP dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang–undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.

  Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan,yaitu :
- Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- Pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Optimalisasi peran anggota Linmas.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung mencakup kepada tugas pokok dan fungsi Satpol PP itu sendiri yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan sasaran dan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Sebagai berikut:

TABEL 3.2

MATRIKS KETERKAITAN TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera).			
MISI 4 : Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Pelaksanaan Layanan terhadap Warga Negara terdampak penegakan perda dan perkada	Meningkatkan Upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif atas Pelanggaran Perda/Perkada dan Peraturan Pelaksanaannya	1. Peningkatan Kuantitas dan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah 2. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya
		Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Meningkatkan Sinergitas Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Satlinmas	1. Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Rakyat Terlatih Lainnya 2. Peningkatan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penyidik PNS 2. Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**			
2	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Tercapainya Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu**		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	
7	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	
8	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
9	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

10	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Tercapainya pemenuhan dokumen pelaksanaan administrasi keuangan yang tepat waktu.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**		
11	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
12	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
13	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	
14	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
15	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Tercapainya Kesesuaian Barang Milik Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**		
16	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
17	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
18	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Tercapainya pemenuhan dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**		
19	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
20	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	

21	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
22	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
23	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Tercapainya pemenuhan dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kantor.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**		
24	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
25	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
26	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
27	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
28	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
29	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
30	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

31	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
32	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**		
33	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
34	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
35	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
36	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
37	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
38	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
39	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Tercapainya pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**		
40	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
41	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
42	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	

43	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan aset yang baik**		
44	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
45	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
46	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	
47	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
48	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
49	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
50	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
51	**Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada**	**Pelaksanaan Layanan terhadap Warga Negara terdampak penegakan perda dan perkada**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**			
52	**Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada**	**Tercapainya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**		
53	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	

54	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dann Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
55	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
56	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	
57	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	
58	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	
59	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	
60	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Terlaksananya uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	
61	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	
62	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

63	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	
64	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	
65	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada w arga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada w arga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	
66	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	
67	**Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**		
68	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
69	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
70	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	
71	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

72	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	
73	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	
74	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
75	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	
76	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
77	**Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada**	**Tercapainya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**		
78	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Pembentukan Sekretariat PPNS			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	
79	Terwujudnya Pelayanan terhadap warga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	

80	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Terlaksananya Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	
81	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	
82	Terw ujudnya Pelayanan terhadap w arga negara terdampak penegakan perda dan perkada	Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	

3.3 Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat. Maka program dan Kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**5**	**0**	**0**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**67.823.067.884,00**				**67.823.067.884,00**
1	**5**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Kab. Bandung**	**79 point 100 persen**	**27.919.471.531,00**	**DAU**		**79 point 100 persen**	**27.919.471.531,00**
1	**5**	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**Kab. Bandung**	**100 persen**	**260.000.000,00**	**DAU**		**100 persen**	**260.000.000,00**
1	5	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	2 dokumen	100.000.000,00	DAU		2 dokumen	100.000.000,00
1	5	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15.000.000,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
1	5	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15.000.000,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
1	5	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15.000.000,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
1	5	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15.000.000,00	DAU		1 dokumen	15.000.000,00
1	5	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	30.000.000,00	DAU		1 Laporan	30.000.000,00
1	5	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	50.000.000,00	DAU		1 Laporan	50.000.000,00
1	5	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	1 dokumen	10.000.000,00	DAU		1 dokumen	10.000.000,00
1	5	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	25 Data	10.000.000,00	DAU		25 Data	10.000.000,00

1	**5**	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**11.861.035.931,00**	**DAU**		**100 Persen**	**11.861.035.931,00**
1	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	64 orang/bulan	11.761.035.931,00	DAU PAD		64 orang/bulan	11.761.035.931,00
1	5	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	35.000.000,00	DAU		1 Laporan	35.000.000,00
1	5	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung	1 dokumen	30.000.000,00	DAU		1 dokumen	30.000.000,00
1	5	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	18 Laporan	35.000.000,00	DAU		18 Laporan	35.000.000,00
1	**5**	**1**	**2,03**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**30.000.000,00**
1	5	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	15.000.000,00	DAU		1 Laporan	15.000.000,00
1	5	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	15.000.000,00	DAU		1 Laporan	15.000.000,00
1	**5**	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**	**Kab. Bandung**	**100%**	**240.000.000,00**	**DAU**		**100%**	**240.000.000,00**
1	5	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bandung	2 Unit	15.000.000,00	DAU		2 Unit	15.000.000,00
1	5	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	1 Paket	100.000.000,00	DAU		1 Paket	100.000.000,00
1	5	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bandung	1Dokumen	25.000.000,00	DAU		1Dokumen	25.000.000,00
1	5	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	64 orang	100.000.000,00	DAU		64 orang	100.000.000,00

1	**5**	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**	**Kab. Bandung**	**100%**	**808.573.789,00**	**DAU**		**100%**	**808.573.789,00**
1	5	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000,00	DAU		1 Paket	10.000.000,00
1	5	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000,00	DAU		1 Paket	10.000.000,00
1	5	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	5.000.000,00	DAU		1 Paket	5.000.000,00
1	5	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	200.000.000,00	DAU		1 Paket	200.000.000,00
1	5	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	75.000.000,00	DAU		1 Paket	75.000.000,00
1	5	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Dokumen	51.000.000,00	DAU		2 Dokumen	51.000.000,00
1	5	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	1 Laporan	20.000.000,00	DAU		1 Laporan	20.000.000,00
1	5	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	437.573.789,00	DAU		1 Laporan	437.573.789,00
1	**5**	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**215.000.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**215.000.000,00**
1	5	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 unit	50.000.000,00	DAU		2 unit	50.000.000,00
1	5	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung	5 unit	50.000.000,00	DAU		5 unit	50.000.000,00
1	5	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Unit	5.000.000,00	DAU		2 Unit	5.000.000,00
1	5	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5.000.000,00	DAU		1 Unit	5.000.000,00
1	5	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Bandung	1 unit	50.000.000,00	DAU		1 Unit	50.000.000,00
1	5	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5.000.000,00	DAU		1 Unit	5.000.000,00
1	5	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	50.000.000,00	DAU		1 Unit	50.000.000,00

1	**5**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**13.813.488.811,00**	**DAU**		**100 Persen**	**13.813.488.811,00**
1	5	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	75.000.000,00	DAU		1 Laporan	75.000.000,00
1	5	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	50.000.000,00	DAU		1 Laporan	50.000.000,00
1	5	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	13.688.488.811,00	DAU		1 Laporan	13.688.488.811,00
1	**5**	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan aset yang baik**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**691.373.000,00**	**DAU**		**100 Persen**	**691.373.000,00**
1	5	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	21 Unit	98.000.000,00	DAU		21 Unit	98.000.000,00
1	5	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	35 Unit	498.373.000,00	DAU		35 Unit	498.373.000,00
1	5	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bandung	2 Unit	5.000.000,00	DAU		2 Unit	5.000.000,00
1	5	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	20 Unit	5.000.000,00	DAU		20 Unit	5.000.000,00
1	5	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	50.000.000,00	DAU		1 Unit	50.000.000,00
1	5	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	25.000.000,00	DAU		1 Unit	25.000.000,00
1	5	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	10.000.000,00	DAU		1 Unit	10.000.000,00
					Jumlah 1				**27.919.471.531,00**				**27.919.471.531,00**

1	**5**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**	**Kab. Bandung**		**39.903.596.353**	**DAU**			**39.903.596.353**
1	**5**	**02**	**2,01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Kab. Bandung**	**100 persen**	**38.008.596.353**	**DAU**		**100 persen**	**38.008.596.353**
1	5	2	2,01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Bandung	1 dokumen	150.000.000	DAU		1 dokumen	150.000.000
1	5	2	2,01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	1 dokumen	22.987.023.400	DAU		1 dokumen	22.987.023.400
1	5	2	2,01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bandung	457 orang	600.000.000	DAU		457 orang	600.000.000
1	5	2	2,01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Bandung	1 dokumen	7.287.213.353	DAU		1 dokumen	7.287.213.353
1	5	2	2,01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Bandung	1 dokumen	75.000.000	DAU		1 dokumen	75.000.000
1	5	2	2,01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kab. Bandung	orang	350.000.000	DAU		orang	350.000.000
1	5	2	2,01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kab. Bandung	dokumen	50.000.000	DAU		dokumen	50.000.000

1	5	2	2,01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kab. Bandung	orang	75.000.000	DAU		orang	75.000.000
1	5	2	2,01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kab. Bandung	orang	750.000.000	DAU		orang	750.000.000
1	5	2	2,01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	orang	350.000.000	DAU		orang	350.000.000
1	5	2	2,01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Kab. Bandung	800 laporan	4.813.647.000	DAU		800 laporan	4.813.647.000
1	5	2	2,01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Bandung	800 laporan	150.000.000	DAU		800 laporan	150.000.000
1	5	2	2,01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada w arga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Bandung	1 laporan	125.000.000	DAU		1 laporan	125.000.000
1	5	2	2,01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Bandung	115 unit	245.712.600	DAU		115 unit	245.712.600
1	**5**	**2**	**2,02**	**0**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	Kab. Bandung	**100 persen**	**1.475.000.000**	**DAU**		**100 persen**	**1.475.000.000**
1	5	2	2,02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		laporan	150.000.000	DAU		laporan	150.000.000
1	5	2	2,02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		dokumen	50.000.000	DAU		dokumen	50.000.000

1	5	2	2,02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		unit	250.000.000	DAU		unit	250.000.000
1	5	2	2,02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		laporan	100.000.000	DAU		laporan	100.000.000
1	5	2	2,02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		laporan	75.000.000	DAU		laporan	75.000.000
1	5	2	2,02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		dokumen	50.000.000	DAU		dokumen	50.000.000
1	5	2	2,02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	200.000.000,00	DAU		1 laporan	200.000.000,00
1	5	2	2,02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		1 laporan	300.000.000,00	DAU		1 laporan	300.000.000,00
1	5	2	2,02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	300.000.000,00	DAU		1 laporan	300.000.000,00
1	**5**	**2**	**2,03**	**0**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**		**100 persen**	**420.000.000**	**DAU**		**100 persen**	**420.000.000**
1	5	2	2,03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		dokumen	100.000.000	DAU		dokumen	100.000.000
1	5	2	2,03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		dokumen	100.000.000	DAU		dokumen	100.000.000

1	5	2	2,03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		laporan	100.000.000	DAU		laporan	100.000.000
1	5	2	2,03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		laporan	50.000.000	DAU		laporan	50.000.000
1	5	2	2,03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		laporan	70.000.000	DAU		laporan	70.000.000
					Jumlah 2				**39.903.596.353**				**39.903.596.353**
					TOTAL (jumlah 1 + 2)				**67.823.067.884,00**				**67.823.067.884,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang –undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan Misi Ke-empat Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan yang dirancang pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 terdiri dari :

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif		
1	**5**	**0**	**0**	**0**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**67.823.067.884,00**		
1	**5**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**Kab. Bandung**	**80 point 100 persen**	**27.919.471.531,00**	**DAU**	
1	**5**	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**	**Kab. Bandung**	**100 persen**	**260.000.000,00**	**DAU**	
1	5	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	2 dokumen	100.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung	1 dokumen	15.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	30.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung	1 Laporan	50.000.000,00	DAU	

1	5	1	2,01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	1 dokumen	10.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	25 Data	10.000.000,00	DAU	
1	**5**	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**11.861.035.931,00**	**DAU**	
1	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	64 orang/bulan	11.761.035.931,00	DAU PAD	
1	5	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	35.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Bandung	1 dokumen	30.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung	18 Laporan	35.000.000,00	DAU	
1	**5**	**1**	**2,03**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**DAU**	
1	5	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	15.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	15.000.000,00	DAU	
1	**5**	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**	**Kab. Bandung**	**100%**	**240.000.000,00**	**DAU**	
1	5	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw ai	Kab. Bandung	2 Unit	15.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung	1 Paket	100.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegaw ai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai	Kab. Bandung	1Dokumen	25.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung	64 orang	100.000.000,00	DAU	

1	**5**	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran.**	**Kab. Bandung**	**100%**	**808.573.789,00**	**DAU**	
1	5	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	5.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	200.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	75.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Dokumen	51.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	1 Laporan	20.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	1 Laporan	437.573.789,00	DAU	
1	**5**	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**215.000.000,00**	**DAU**	
1	5	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bandung	2 unit	50.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung	5 unit	50.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung	2 Unit	5.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Bandung	1 unit	50.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	5.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Unit	50.000.000,00	DAU	

1	**5**	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**13.813.488.811,00**	**DAU**	
1	5	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	75.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	50.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Laporan	13.688.488.811,00	DAU	
1	**5**	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan aset yang baik**	**Kab. Bandung**	**100 Persen**	**691.373.000,00**	**DAU**	
1	5	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bandung	21 Unit	98.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	35 Unit	498.373.000,00	DAU	
1	5	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bandung	2 Unit	5.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	20 Unit	5.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	50.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	25.000.000,00	DAU	
1	5	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 Unit	10.000.000,00	DAU	
					Jumlah 1				**27.919.471.531,00**		

1	**5**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum**	**Kab. Bandung**		**39.903.596.353**	**DAU**	
1	**5**	**02**	**2,01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Kab. Bandung**	**100 persen**	**38.008.596.353**	**DAU**	
1	5	2	2,01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Bandung	1 dokumen	150.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bandung	1 dokumen	22.987.023.400	DAU	
1	5	2	2,01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bandung	457 orang	600.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Bandung	1 dokumen	7.287.213.353	DAU	
1	5	2	2,01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kab. Bandung	1 dokumen	75.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kab. Bandung	orang	350.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kab. Bandung	dokumen	50.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kab. Bandung	orang	75.000.000	DAU	

1	5	2	2,01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kab. Bandung	orang	750.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Bandung	orang	350.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Kab. Bandung	800 laporan	4.813.647.000	DAU	
1	5	2	2,01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Bandung	800 laporan	150.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada w arga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Bandung	1 laporan	125.000.000	DAU	
1	5	2	2,01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Bandung	115 unit	245.712.600	DAU	
1	**5**	**2**	**2,02**	**0**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perkada**	Kab. Bandung	**100 persen**	**1.475.000.000**	**DAU**	
1	5	2	2,02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		laporan	150.000.000	DAU	
1	5	2	2,02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		dokumen	50.000.000	DAU	
1	5	2	2,02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		unit	250.000.000	DAU	

1	5	2	2,02	0007	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		laporan	100.000.000	DAU	
1	5	2	2,02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		laporan	75.000.000	DAU	
1	5	2	2,02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		dokumen	50.000.000	DAU	
1	5	2	2,02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	200.000.000,00	DAU	
1	5	2	2,02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		1 laporan	300.000.000,00	DAU	
1	5	2	2,02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 laporan	300.000.000,00	DAU	
1	**5**	**2**	**2,03**	**0**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**		**100 persen**	**420.000.000**	**DAU**	
1	5	2	2,03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		dokumen	100.000.000	DAU	
1	5	2	2,03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		dokumen	100.000.000	DAU	
1	5	2	2,03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		laporan	100.000.000	DAU	
1	5	2	2,03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		laporan	50.000.000	DAU	
1	5	2	2,03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		laporan	70.000.000	DAU	
					Jumlah 2				**39.903.596.353**		
					TOTAL (jumlah 1 + 2)				**67.823.067.884,00**		

Berdasarkan tabel diatas, Satpol PP mempunyai 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan 11 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan.

Total Pagu Anggaran pada Renja Satpol PP Tahun 2025 adalah sebesar Rp.67.823.067.884,- yang terbagi pada Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 27.919.471.531,- dan Pagu pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp.39.903.596.353,- .

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*Stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

ttd

MOCHAMAD USMAN

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusun agenda kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
6	Penelaahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		√		
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.				
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Surat Edaran Bupati/Wali Kota.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah				

	dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota telah Menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disyahkan.				

Soreang, Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

MOCHAMAD USMAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197110091991011001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Raya Soreang Km.17 Telp./Fax. (022) 5891634 Soreang 40912
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail :
satpolpp@bandungkab.go.id
Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 800/0784/Pol.PP/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;

b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Bandung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktur Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang telah ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

MOCHAMAD USMAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197110091991011001

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung
Nomor : 800/0784 /Pol.PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

Penanggungjawab	:	Kepala Satpol PP
Ketua Tim	:	Sekretaris Satpol PP
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Program
Tim Pelaksana	:	1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	:	2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
	:	3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Aparatur
	:	4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
	:	5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	:	6. Kepala Sub Bagian Keuangan
	:	7. Fungsional Satpol PP
	:	8. Staff pada Sub Bagian Program

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG

MOCHAMAD USMAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197110091991011001